

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah Sri Juni Woro Astuti.....	85–94
Media Pers Lokal Melawan Korupsi Dwiyanto Indiahono	95–101
Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Machya Astuti Dewi	102–111
Kampanye Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2009 Wahidah Zein Br Siregar	112–118
Upaya Pengentasan Kemiskinan di Madura sebagai Model Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Ekna Satriyati dan Devi Rahayu.....	119–129
Penyusunan Kebijakan <i>Partnership</i> dan <i>Development</i> dalam Pemanfaatan Dana BUMN untuk Pengembangan UKM Priyono Tri Febrianto.....	130–138
<i>Social Early Warning System</i> untuk Mengantisipasi Konflik Sosial di Masyarakat Karnaji, Septi Ariadi, Soebagyo Adam, dan Siti Mas'udah	139–151
Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar <i>Issue Global Warming</i> pada Masyarakat Tamping Moch. Jalal	152–161
Study on Islamic Literature Viewed from Theosophical Perspective Amir Fatah	162–167

Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar *Issue Global Warming* pada Masyarakat Tamping

Moch. Jalal¹

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

This paper describes the hindrance in collecting information in global warming issue in two monolingual communities: Bojonegoro and Tuban. The research used in-depth interview to 250 individuals in the tamping communities --the communities that surrounded the forest. The research also used FGD to public figures and related agencies in Bojonegoro and Tuban. Almost all people there do not understand the global warming issues. However, they do have concern for conservation of the environment, especially the forest. The community evidently has developed the understanding as well as the appropriate behavior in relation to the conservation of the environment. The media, that has the nearness of emotions with the community as well as the use of language similar to the way they communicate daily, is the most effective and easiest one to be accepted by the community in the information acquisition in relation to the environment and global warming issue. Involving people in various activities of partnership in the forest management is very effective to make them concern more for the forest environment.

Key words: *hindrance, conservation, behavior, forest, local wisdom*

Issue pelestarian lingkungan hidup dan *global warming* merupakan masalah sangat penting yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap issue lingkungan tersebut dapat berdampak pada bagaimana kondisi lingkungan hidup di sekitar mereka. Pemahaman yang memadai serta ditunjang dengan adanya kesadaran yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup akan berdampak positif pada kelestarian lingkungan. Sebaliknya dengan tidak adanya pemahaman serta kesadaran memadai terhadap lingkungan akan berpotensi terhadap makin buruknya kondisi lingkungan hidup. Tidak menutup kemungkinan justru mereka sendirilah yang akhirnya ikut andil besar dalam proses perusakan ekologi hutan serta menambah buruknya situasi *global warming*.

Rusaknya lingkungan hidup di area tertentu ternyata tidak hanya berdampak buruk di sekitar area tersebut. Imbas yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan di sebuah wilayah ternyata dapat menjangkau area yang sangat luas bahkan dapat bersifat mengglobal. Hal semacam itulah yang saat ini menimbulkan masalah *global warming* atau pemanasan global sebagai imbas dari persoalan rusaknya lingkungan hidup, terutama hutan di area tertentu.

Hutan memiliki peran yang sangat vital dalam kelangsungan hidup umat manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan keberadaan hutan juga dapat memengaruhi iklim serta kondisi lingkungan di area sekitarnya. Termasuk dalam hal ini harus diperhatikan fungsi penting hutan, antara lain: sebagai resapan air hujan, sumber air bersih, tempat konservasi hewan dan tumbuhan, serta menyimpan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan manusia. Sumber daya hutan ini terutama menjadi tumpuan dan sumber kehidupan bagi masyarakat yang hidup di sekitar area hutan.

Masyarakat *monolingual* sekitar hutan adalah kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan relatif hanya memiliki kompetensi komunikasi 1 (satu) sistem bahasa saja dalam aktivitas komunikasi mereka. Dari aspek sosial ekonomi, kebanyakan masyarakat sekitar hutan merupakan kelompok masyarakat marginal serta memiliki banyak keterbatasan. Akibat dari berbagai keterbatasan tersebut sering kali membuat semua aspek kehidupan mereka menjadi tertinggal.

Di bidang informasi pun mereka sering kali tertinggal oleh informasi penting. Misalnya, informasi seputar *issue global warming* yang hanya

¹ Korespondensi: M. Jalal, Departemen Sastra Indonesia, FIB, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya. E-mail: jalal_unair@yahoo.com

disebarluaskan melalui media modern dan relatif hanya menjadi konsumsi masyarakat modern di perkotaan. Padahal informasi tersebut sebenarnya sangat penting bagi kehidupan mereka, juga bagi kelestarian ekologi hutan yang ada di sekitar mereka.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan hasil *depth interview* terhadap 250 masyarakat tamping serta dari hasil kegiatan FGD terhadap tokoh masyarakat dan instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, serta wilayah lain di Provinsi Jawa Timur, masyarakat sekitar hutan atau yang dikenal dengan istilah masyarakat tamping.

Hasil Penelitian

Masyarakat tamping sebenarnya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki posisi penting dalam pelestarian hutan. Jika diberdayakan dengan benar, keberadaan mereka dapat menjadi aset untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan. Namun di satu sisi juga terdapat kenyataan jika sebagian masyarakat tamping adakalanya kurang memiliki kepedulian untuk berperan secara aktif dalam memelihara kelestarian hutan di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka hanya sering memanfaatkan berbagai potensi hutan seperti, kayu, dedaunan, serta berbagai flora dan fauna yang memiliki nilai secara ekonomis. Kenyataan itu menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman masyarakat sekitar hutan terhadap *issue* pelestarian lingkungan dan *global warming*.

Masyarakat yang hidup di pinggiran hutan atau yang dikenal dengan istilah masyarakat tamping, merupakan kelompok masyarakat yang banyak memiliki keterbatasan dalam kehidupan mereka. Kelompok masyarakat ini di wilayah Kabupaten Bojonegoro maupun Tuban, rata-rata bermukim di lokasi yang relatif jauh dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sebagai akibat dari kondisi tersebut antara masyarakat tamping dan masyarakat pusat kota sering kali memiliki jarak kesenjangan dalam berbagai aspek. Secara sosial mereka mengembangkan pola kehidupan sesuai dengan keterbatasan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar mereka. Secara ekonomi, arus perputaran uang maupun sektor yang dapat dijadikan sebagai bidang usaha tentu tidak pernah sebanding secara kuantitatif maupun kualitatif dengan kondisi di

pusat perkotaan. Di bidang politik pun keberadaan masyarakat tamping ini relatif tidak memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan di kancah politik lokal, regional, apalagi di tingkat nasional.

Masyarakat Tamping juga bukanlah kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan memadai. Dari 250 masyarakat tamping yang diwawancarai di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, masih ditemukan sebanyak 162 responden atau 64,8% yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Sementara itu 46 responden atau 18,4% sekolah SD atau yang sederajat. Sedangkan yang menyatakan tamat sekolah dasar atau sederajat hanya 42 atau 16,8% saja.

Tabel 1.
Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	162	64,8
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	46	18,4
3	Tamat Sekolah Dasar	42	16,8
Jumlah		250	100,0

Keterbatasan serupa juga terjadi di sektor pemerolehan arus informasi. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mereka miliki dalam mengakses *issue* penting dan terkini mengenai lingkungan hidup, membuat pemahaman terhadap masalah-masalah terbaru menjadi tertinggal. Hingga saat ini tidak seorang pun dari 250 masyarakat tamping yang diwawancarai menyatakan telah memahami persoalan *global warming*. Jangankan memahami pengertian ataupun deskripsinya, mendengar istilahnya saja mereka menyatakan belum pernah.

Keterbatasan ini menjadikan masyarakat Tamping mengalami kendala dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan isu *global warming*. Kondisi masyarakat Tamping yang berasal dari warga dengan tingkat pendidikan rendah telah menyebabkan rendahnya daya serap mereka terhadap berbagai informasi yang dilakukan oleh orang lain, apalagi dari orang yang berbeda bahasa. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Jawa Mataraman, sedangkan bahasa selain itu jarang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kondisi ini menghambat keberterimaan informasi masyarakat Tamping terhadap berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi di dunia, termasuk di dalamnya adalah informasi tentang *global warming*.

Faktor pendidikan membawa implikasi bagi lemahnya penguasaan bahasa selain bahasa pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari, berbagai istilah yang tidak mereka hadapi dan lakukan setiap hari akan jarang ditemukan, bahkan tidak akan

ditemukan. Menjadi wajar jika masyarakat pada kondisi yang demikian mengalami kendala dalam penerimaan informasi pemanasan global. Hal ini dapat dilihat dari temuan di lapangan, bahwa dari sekitar 250 responden yang diberikan pengenalan istilah *global warming* ternyata tidak satupun yang mengetahuinya, minimal akrab dengan istilah ini.

Tidak pahamnya masyarakat tamping dengan istilah pemanasan global atau *global warming* bukan berarti mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman seputar *issue* lingkungan di sekitar mereka. Mereka memang kurang paham pada fungsi-fungsi hutan seperti: bahwa keberadaan hutan dapat memengaruhi iklim dunia; bahwa keberadaan hutan dapat meredam polusi udara akibat asap pabrik atau kendaraan bermotor; bahwa kuantitas dan kualitas hutan nantinya dapat memengaruhi lapisan ozon yang melindungi bumi dari sengatan sinar matahari secara berlebihan. Masyarakat tamping pada dasarnya telah mengembangkan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat hutan dari sisi yang lain.

Walaupun tidak diperoleh melalui media informasi atau lewat jalur pendidikan, dengan bekal *common sense* yang dimiliki, mereka ternyata juga mempunyai pemahaman terhadap lingkungan hutan berdasarkan hasil pembelajaran mereka sendiri. Misalnya pemahaman mengenai: (1) keberadaan hutan sangat berpengaruh terhadap kondisi sumber air di sekitar mereka, (2) keberadaan hutan sebagai sarana perlindungan pemukiman mereka dari angin kencang dan badai, (3) sebagian masyarakat sangat tergantung pada berbagai sumber daya terkait dengan keberadaan hutan, misalnya memanfaatkan ranting-ranting atau recek kayu jati, mengambil daun-daun jati, memanfaatkan potensi fauna dan flora yang hidup di lingkungan hutan, dan lain-lain, (4) hutan sangat bermanfaat dalam mencegah terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Terkait dengan pemahaman fungsi hutan seperti yang telah disebutkan tadi, dari 250 masyarakat tamping yang diwawancarai hanya 36 atau 14,4% responden yang tidak paham. Sementara itu 61 atau 24,4% responden kurang paham. Sedangkan 102 atau 40,8% dinyatakan cukup paham, serta 51 atau 20,4% responden sangat paham.

Data di atas menyebutkan bahwa pemahaman terhadap fungsi dan peranan hutan memang cukup baik. Masyarakat Tamping memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengelola fungsi dan peranan hutan. Kearifan lokal itu diperoleh dari warisan turun-temurun sebagai sebuah pengetahuan berdasar pengalaman kehidupannya. Bagi masyarakat Tamping, hutan bukan sekedar kumpulan pohon yang

bermakna fisik/benda, melainkan hutan memiliki makna strategis sebagai penopang kehidupan sosial ekonomi mereka. Itulah sebabnya, bagi masyarakat tamping, fungsi hutan memiliki makna bagi ketersediaan sumber kehidupan masyarakatnya.

Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Persoalan Pelestarian Lingkungan dan *Global Warming*

Issue seputar lingkungan hidup, khususnya masalah pemanasan global atau *global warming* dalam banyak hal memang masih belum tersosialisasikan kepada masyarakat tamping. Memprihatinkan memang. Ketika di belahan masyarakat lain, isu *global warming* begitu cepat mendapatkan respon global, bahkan banyak warga yang kemudian berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam meminimalisir dampak buruk pemanasan global, tapi masyarakat tamping pinggiran hutan di Bojonegoro dan Tuban ternyata masih menemui sejumlah kendala dalam pemerolehan arus informasi tersebut. Padahal sebagai masyarakat pinggiran hutan, problema *global warming* hendaknya menjadi satu isu penting terkait dengan situasi rusaknya lingkungan dunia. Hutan dianggap sebagai penyangga bumi agar tidak cepat rusak alam lingkungannya.

Berbagai kendala biasanya selain karena wilayah yang agak terisolir, juga karena akses mencapai tempat tersebut cukup melelahkan dan sulit terjangkau. Implikasi logisnya, mengakibatkan masyarakat tamping mengalami kesulitan mendapat berbagai akses pemerolehan dan merespon informasi, termasuk isu tentang *global warming*. Kendala utama dari rendahnya merespon isu *global warming* adalah terkait dengan bahasa.

Disadari bahwa bahasa yang banyak digunakan dalam informasi tentang isu lingkungan hidup, terutama *global warming* selain menggunakan Bahasa Inggris, juga dilakukan dengan Bahasa Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena Bahasa Inggris merupakan bahasa pergaulan internasional, sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara. Arus informasi terkait dengan isu-isu lingkungan hidup pada akhirnya akan dominan menggunakan kedua bahasa tersebut. Realitas ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan kedua bahasa tersebut dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat tamping di sekitar hutan Bojonegoro dan Tuban mengalami kendala ini.

Data yang diperoleh menunjukkan fakta bahwa ternyata dari 250 responden yang diwawancarai,

100% menyatakan banyak menggunakan bahasa Jawa (ngoko/kromo), bahkan tidak pernah menggunakan bahasa selain bahasa ini. Penggunaan Bahasa Jawa ini memang beralasan, selain karena memang merupakan bahasa ibu, Bahasa Jawa hanya menjadi satu-satunya bahasa yang paling akrab mereka gunakan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional hanya digunakan dalam forum-forum resmi seperti di pendidikan formal saja, sementara kantor formal seperti balai desa juga lebih banyak menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi antara birokrasi desa.

Kosa kata bahasa ibu mereka (bahasa Jawa) tidak memiliki simbol berkaitan dengan isu *global warming*, kecuali istilah menjaga lingkungan. Menurut Eric Fromm (1968) pikiran atau kognisi manusia biasanya dibentuk oleh percakapan dan pengalaman kehidupan mereka. Dalam komunikasi yang menggunakan *monolingual* akan membentuk pola pengetahuan sama terkait dengan area perbincangan sebagai *common sense* seseorang tentang segala sesuatu terkait dengan area perbincangan itu.

Minimnya proses komunikasi dengan menggunakan bahasa selain bahasa ibu mereka, menyebabkan isi pewacanaan tidak terkait dengan beragam peristiwa di luar diri mereka. Pengalaman kehidupan mereka sehari-hari terkait dengan sawah, tanah, ternak dan ruang lingkungannya membuat mereka miskin pengetahuan di luar pengalaman kehidupan mereka.

Terlihat betapa penguasaan bahasa Indonesia yang cenderung rendah tentu saja menyulitkan mereka mendapat pengetahuan yang benar dan konstruktif tentang isu pelestarian lingkungan dan *global warming* yang hampir didominasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Data di atas menunjukkan betapa masih memprihatinkannya pemahaman masyarakat tamping terhadap bahasa Indonesia. Dari 250 orang, sekitar 130 orang (52%) sangat kurang memahami bahasa Indonesia, yang kurang dan pas-pasan sebanyak 120 orang (68%). Kondisi ini tentu saja berkaitan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat tamping yang mayoritas hanya berpendidikan SMP.

Realitas penggunaan dan pemahaman bahasa komunikasi ini tentu saja kian menyulitkan masyarakat tamping untuk mendapatkan informasi seputar isu lingkungan hidup secara memadai. Alih-alih dapat memberikan respon, mendapatkan informasi yang benar dan tepat pun mereka mengalami kesulitan. Menjadi wajar jika masyarakat tamping bersikap tidak tahu-menahu terhadap isu

lingkungan hidup atau *global warming*. Belum lagi dengan realitas kompetensi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat tamping juga ditemukan fakta memprihatinkan.

Pemahaman mengenai masalah issue global warming dan lingkungan hidup ternyata berbanding lurus dengan kepemilikan media/sarana informasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa dari sekitar 250 responden, hanya sekitar 43 orang atau 17,2% yang tidak memiliki sarana informasi seperti TV maupun radio. Selebihnya sekitar 82,8% warga memiliki kedua atau salah satu dari sarana informasi tersebut. Padahal diketahui bahwa arus informasi berkaitan dengan isu lingkungan hidup banyak dilakukan melalui media TV maupun radio, sementara kedua media tersebut lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Tentu saja memprihatinkan. Bagaimana mungkin kepemilikan media elektronik yang dominan dengan bahasa Indonesia justru tidak mengakrabkan masyarakat tamping dengan penguasaan bahasa Indonesia.

Kendala pemerolehan informasi tentang isu lingkungan hidup memang bersumber dari sulitnya mereka memahami bahasa yang disampaikan lewat media tersebut. Padahal bahasa selalu menjadi alat penting dalam sosialisasi termasuk di dalamnya adalah dominasi. Sedangkan media massa berfungsi sebagai *transmission of culture* yang efektif bagi sebuah sosialisasi budaya tertentu. Jadi, penggunaan media massa dan bahasa sebagai alat sosialisasi sekaligus transformasi paling memungkinkan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mengubah perilaku masyarakat.

Tabel 2.
Peran Media dalam Pemberian Informasi Pelestarian Hutan

No	Deskripsi	Jumlah	%
1	Iklan lingkungan di TV	17	6,8
2	Berita bencana alam akibat	45	18,0
3	kerusakan hutan	188	75,2
	Tidak tahu		
	Jumlah	250	100,0

Dengan demikian, sangat jelas terlihat betapa masyarakat tamping sesungguhnya tidak merespon berbagai berita terkait dengan isu lingkungan hidup ini. Padahal menurut Hans Daeng (2000: 134), kepedulian masyarakat terhadap lingkungan salah satunya ditandai dengan bagaimana mereka melakukan respon atas berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi, baik di sekitar mereka maupun di luar lingkungan mereka. Ketidakpedulian masyarakat tamping bukan karena mereka sengaja tidak peduli, melainkan karena minimnya informasi

verbal yang mereka dapatkan. Kalau toh mereka mendapatkannya, itupun susah untuk dimengerti terkait dengan kendala bahasa yang ada.

Namun demikian, ditengah kecemasan publik atas minimnya respon masyarakat tamping terhadap isu pelestarian hutan, ada secercah harapan bahwa ternyata mereka percaya bahwa sejumlah media dapat digunakan sebagai sarana memperoleh informasi pelestarian lingkungan. Bagi masyarakat tamping, media TV dianggap memiliki peran paling efektif dan mudah dalam pemberian pemahaman ini yakni sekitar 125 orang atau sekitar 50%, sisanya menganggap radio dan media lainnya. Mengapa televisi? Karena masyarakat tamping lebih menyukai berlama-lama di depan televisi dengan melihat dan mendengar daripada hanya sekedar membaca apalagi mendengarnya.

Bagi masyarakat tamping media televisi yang menampilkan gambar dan ada percakapannya membuat mereka lebih mudah memahami pesan yang disampaikan, meskipun berupa visualisasi gambar atau iklan. Melalui media televisi berbagai informasi dapat mereka saksikan, meskipun masih sangat susah untuk mengerti secara penuh informasi yang tersampaikan.

Memperhatikan perilaku menonton masyarakat tamping yang lebih dominan daripada mendengar radio atau dikumpulkan di sebuah tempat untuk mendengarkan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan, maka tidak heran jika televisi dianggap sebagai media paling efektif dan mudah diterima. Persoalannya, berbagai kendala terkait dengan pemerolehan informasi melalui media ternyata masih cukup kuat.

Minimnya akses memperoleh informasi ini tentu saja menyulitkan sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan bagi masyarakat tamping. Sebagaimana diketahui, masyarakat tamping juga jarang melakukan interaksi dengan warga masyarakat lainnya, sehingga kurang mendapatkan pengetahuan yang terkait dengan berbagai isu publik, termasuk pelestarian lingkungan dan isu *global warming*. Kendala-kendala terkait dengan pemahaman tentang pelestarian lingkungan dan isu *global warming* memang lebih banyak terdapat dari aspek internal masyarakat tamping itu sendiri.

Berbagai kendala internal berupa; 1) kurangnya penguasaan bahasa Indonesia, 2) tingkat pendidikan yang rendah, 3) minimnya akses memperoleh informasi dari media, dan 4) rendahnya volume interaksi dengan warga lain yang mungkin dapat sedikit membuka wawasan tentang isu lain di luar kegiatan mereka sehari-hari. Hal ini dimaklumi

karena lingkungan mereka jauh dari masyarakat di luar mereka.

Kendala penggunaan bahasa yang didominasi bahasa *monolingual* menjadikan transfer *knowledge* yang ada hanya berkutat dari pengalaman kehidupan warga masyarakat tamping serta sedikit informasi dari warga di luar mereka. Kegagalan memaknai hadirnya media elektronika untuk menguatkan arus informasi terkait dengan wacana pelestarian lingkungan dan *global warming*. Alih-alih terkuatkan, yang terjadi justru media elektronika hanya berfungsi sebagai media hiburan dan bukan lagi sebagai sarana mendapatkan pengetahuan baru.

Potensi dan peran Serta lembaga-lembaga sosial lokal

Pada sisi peran serta lembaga lokal, yang paling menonjol adalah peran dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sebuah lembaga lokal yang berdiri atas prakarsa warga yang difasilitasi oleh desa setempat. Pada sisi peran Negara hingga saat ini masih terdapat banyak kelemahan terutama berkaitan dengan pengorganisasian dan manajemen pengelolaan LMDH tersebut. Selain karena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), juga rendahnya proses *up-grading* dari SDM itu sendiri. Alasan yang sangat stereotip adalah besarnya biaya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengorganisasian warga masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Padahal yang paling menonjol adalah rendahnya komitmen Negara atau pemerintah lokal dalam memperkuat lembaga lokal tersebut sebagai garda terdepan bagi *community development* yang menggerakkan warga untuk terlibat dalam berbagai program Negara terkait dengan pelestarian lingkungan serta isu *global warming*.

Terkait dengan peran lembaga sosial dalam pelestarian lingkungan ini memang belum bisa optimal. Meskipun disadari bahwa temuan di lapangan menunjukkan betapa LMDH memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya arti kelestarian lingkungan bagi kelangsungan kehidupan mereka, serta bagaimana warga memperoleh informasi yang baik berkaitan dengan isu *global warming* tersebut.

Menurut Laksono *et al.* (2000:89) dalam komunitas-komunitas sekitar hutan, peran lembaga sosial memiliki makna yang strategis. Artinya, masyarakat setempat membutuhkan lembaga sosial yang terlibat dalam penguatan kapasitas masyarakat, termasuk dalam rangka memobilisasi massa

agar terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat setempat belumlah memiliki kekuatan memadai untuk melakukan transformasi sosial berkaitan dengan pengelolaan alam lingkungan demi terwujudnya kelestarian lingkungan.

Kondisi masyarakat tamping yang menjadi objek penelitian ini memang mengharuskan adanya keterlibatan lembaga sosial dalam mengintervensi pentingnya pelestarian lingkungan hutan. Pengetahuan yang ada dari mereka yang di dapatkan dari pengalaman kehidupan sehari-hari (*common sense*) belumlah memadai. Kesederhanaan pengetahuan ini jika tidak segera diantisipasi dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kekuatan luar lingkungan mereka yang sudah berorientasi ekonomi dalam rangka mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan hutan. Hans Daeng (2000:124) mengatakan bahwa keterlibatan lembaga sosial yang *concern* dalam pengelolaan lingkungan hutan selama ini memang telah banyak dilakukan. Namun demikian, ada banyak problema yang muncul dalam keterlibatan lembaga sosial ini, yakni masuknya kepentingan-kepentingan asing yang berupaya menguasai sumber daya hutan untuk dimanfaatkan secara maksimal, meski cenderung merugikan bagi kelestarian lingkungan hutan.

Dalam konteks ini, maka masyarakat tamping di sekitar hutan Bojonegoro dan Tuban selain mendapat informasi pelestarian lingkungan hutan dari media elektronik, mereka juga mendapatkannya dari berbagai lembaga yang ada, baik penyuluhan perhutani yang memang berkepentingan terhadap terjaganya sumber daya hutan yang menjadi milik mereka, juga dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sebanyak 75 orang (30%) mendapatkannya dari bahwa penyuluhan perhutani, 30,8% (77 orang) mendapatkannya dari LMDH dan sisanya ternyata mengatakan tidak mendapatkan sumber informasi dari manapun.

Fakta minimnya lembaga sosial yang terlibat dalam sosialisasi pentingnya pelestarian hutan tampaknya juga menjadi kendala bagi masyarakat tamping dalam memperoleh informasi ini. Banyak faktor yang menjadi penyebab keterlibatan lembaga sosial begitu rendah: 1) tidak ada isu atau peristiwa kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan di daerah ini, sehingga lembaga sosial yang *concern* dengan isu lingkungan tidak tertarik memberikan pemberdayaan, 2) ketertutupan akses bagi lembaga sosial di luar perhutani atau LMDH untuk masuk dalam ruang-ruang pengelolaan hutan, dan 3) bisa jadi karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tamping yang tidak begitu mempedulikan berbagai

problema pengelolaan lingkungan di sekitar mereka. Bagi mereka yang penting bisa memanfaatkan lingkungan hutan bagi kelangsungan hidup mereka itu saja sudah cukup, daripada harus disibukkan dengan berbagai aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka secara langsung.

Tabel 3.

Sarana Lain sebagai Sumber Informasi Pelestarian Lingkungan Hutan

No	Sarana Lain	Jumlah	%
1	Penyuluhan Perhutani	75	30,0
2	Informasi dari LMDH	77	30,8
3	Tidak ada	98	39,2
Jumlah		250	100,0

Di lain pihak, masyarakat tamping ternyata justru memiliki institusi-institusi non formal yang dianggap lebih efektif dalam mensosialisasikan informasi berdasarkan tingkat kebutuhan dan bahasa yang akrab dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lembaga-lembaga non formal itu sudah melembaga dalam masyarakat tamping seperti majlis tahlilan, hajatan warga maupun pengajian. Kegiatan-kegiatan dalam lembaga-lembaga non formal tersebut rutin diselenggarakan. Biasanya masyarakat tamping terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga non formal ini.

Lembaga non formal biasanya lebih bersifat seremonial daripada sebuah institusi yang sistematis, sebagaimana lembaga formal. Lembaga-lembaga formal muncul sebagai kebutuhan warga masyarakat dalam menjalin komunikasi antar warga serta mudah memobilisasi warga dalam sebuah kegiatan yang sama. Selama ini dalam masyarakat pinggiran hutan yang mayoritas beragama Islam, lembaga non formal yang ada biasanya lebih merupakan perkumpulan warga dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

Masyarakat tamping beranggapan bahwa sumber informasi menjadi lebih efektif jika disampaikan lewat forum informal seperti tahlilan, pengajian, waktu hajatan warga, kegiatan lain di desa. Sekitar 38% atau 95 orang menganggap bahwa forum ini lebih efektif, karena di samping sudah akrab dengan pikiran masyarakat setempat juga bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pengetahuan sehari-hari.

Bagi masyarakat tamping, sumber informasi berkaitan dengan kelestarian lingkungan justru lebih tepat jika menggunakan sarana sosialisasi berupa media atau forum yang setiap hari terlibat dalam kehidupan mereka. Bahasa yang digunakan dipastikan akan sesuai dengan bahasa pergaulan

sehari-hari. Hal ini tentu saja meminimalisir kemungkinan tidak pahamnya masyarakat terkait dengan kendala bahasa yang dimilikinya. Begitu juga dengan kondisi pengetahuan yang dimilikinya. Melalui penggunaan forum-forum non formal justru masyarakat tamping lebih merasa nyaman untuk ikut dalam sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi pengetahuan yang dimilikinya. Selama ini selalu terjadi kesenjangan arus informasi terkait dengan pemanasan global, karena faktor bahasa dan perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki.

Harus diakui bahwa banyak kegagalan dalam sebaran informasi tentang berbagai kebijakan atau isu terkait dengan lingkungan hutan banyak dipengaruhi oleh kegagalan memilih sarana sosialisasi. Karena tidak pernah memperhatikan kebutuhan lokal serta kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, maka masyarakat pinggiran hutan merasa bahwa sosialisasi tersebut tidak berkaitan dengan kebutuhan mereka, melainkan semacam instruksi dari orang lain yang memiliki kepentingannya sendiri.

Masyarakat hutan atau masyarakat tamping disadari merupakan sekelompok orang yang hidup bergantung pada sumber daya hutan. Kondisi ini tentu saja akan berhubungan dengan pola pikir, sistem pengetahuan, lapangan kerja serta ruang lingkup kehidupan di hutan. Oleh karena ini, bagi mereka, kebutuhan sehari-hari adalah bagaimana bisa tetap memanfaatkan sumber daya hutan demi kelangsungan kehidupan mereka. Letak wilayah yang jauh dari pusat kota juga membawa pengaruh bagi terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat tamping dengan masyarakat luar. Dengan demikian, upaya pemerolehan informasi pelestarian lingkungan harusnya diletakkan dalam konteks bagaimana masyarakat tamping memposisikan dirinya dalam kehidupan di sekitar hutan. Mereka adalah masyarakat yang sejak lahirnya berada di pinggiran hutan dan bergulat dengan berbagai persoalan pengelolaan hutan, sehingga kondisi ini jelas akan membentuk pengalaman kehidupan yang dapat menjadi sistem pengetahuan lokal terkait dengan bagaimana mereka harus mengelola lingkungan hutan bagi kelangsungan kehidupan dirinya dan masa depannya.

Menurut Murdiyanto, pendamping LMDH Kedewan sekaligus seorang mandor hutan, selama ini anggota LMDH justru merupakan pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan. Mereka yang aktif memberikan pendampingan dan transformasi pengetahuan kepada warga terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Dulu sekitar tahun 80an, ketika LMDH belum berdiri, warga

masyarakat banyak yang belum mengetahui batas-batas tentang pengelolaan lingkungan hutan dan pemanfaatannya. Baru setelah ada pengelolaan hutan secara resmi oleh Perhutani dan berdirinya LMDH, warga mulai mengenal adanya *rencak*, sebuah area dalam hutan yang bebas dipergunakan masyarakat meskipun tetap sejalin pengelola hutan.

Sementara itu menurut Kasdi (46 tahun), ketua LMDH Kedewan, fungsi lembaga ini selain sebagai wadah warga masyarakat dalam mengelola lingkungan, juga merupakan forum warga yang berkepentingan untuk memberikan kesadaran warga tamping terhadap pentingnya hutan bagi kelangsungan kehidupan masa depan manusia. Menurutnya, memang kelemahan mendasar dari lembaga ini adalah minimnya pengetahuan tentang *global warming* yang membuat mereka enggan menyampaikan informasi perihal isu tersebut kepada warga masyarakat lainnya.

Model Alternatif dalam Pelestarian Lingkungan dan Global Warming

Di pihak lain, kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Penyebab utamanya adalah, karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan. Hal ini terjadi mengingat kelemahan kekuatan politik dari pihak-pihak yang menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Seperti diketahui, pada saat ini perjuangan untuk melestarikan lingkungan hanya didukung sekelompok kecil kelas menengah yang kurang mempunyai kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Seperti kelompok-kelompok peduli lingkungan, LSM, individu-individu yang aktif dalam pelestarian lingkungan dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan lingkungan, serta kalangan akademisi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektor dan cenderung terpusat, menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Yang menarik dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hutan adalah minimnya keterlibatan masyarakat pinggiran hutan. Seolah masyarakat tersebut hanya menjadi objek penderita/penyerta dari berbagai persoalan kelestarian hutan. Bahkan masyarakat tamping –dalam banyak

hal— juga sering kali dicurigai sebagai penyebab terjadinya penurunan kualitas ekologi dalam hutan yang ada, karena perilaku kehidupannya yang tidak tertata. Padahal justru masyarakat tamping adalah masyarakat yang lebih dahulu menerima akibat dari berbagai pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan aturannya. Meskipun harus diakui juga bahwa ternyata ada perilaku dari masyarakat tamping yang cenderung berpotensi merusak kelestarian lingkungan hutan.

Sebagaimana diketahui, di sekitar pinggiran hutan yang menjadi objek penelitian ini terdapat aktivitas penambangan minyak di sumur-sumur tradisional di Desa Wonocolo di satu sisi sedikit dapat meredam aktivitas pencurian kayu jati. Di sisi lain, limbah dari aktivitas tersebut ternyata kurang dikelola dengan baik sehingga merusak tanaman-tanaman hutan di sekitar lokasi penambangan. Penambangan tradisional ini memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga pemerintah daerah belum mengambil tindakan preventif berkaitan dengan kondisi rusaknya sebagai lingkungan hutan. Pemerintah mungkin tidak ingin gegabah menutup sumur-sumur tradisional tersebut, karena di samping sudah cukup lama menjadi aktivitas masyarakat untuk menjadi sumber penghasilan, juga karena sebagian besar dari mereka mengeksplorasi tanah miliknya sendiri. Dikhawatirkan ada resistensi atau perlawanan dari masyarakat pinggiran hutan jika pemerintah daerah menutup penambangan minyak.

Diperlukan penataan yang berkeadilan dari lembaga terkait, agar eksplorasi minyak dengan menggunakan sumur-sumur tradisional tersebut tidak berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan. Rusaknya areal hutan di wilayah Ngambon terutama disebabkan karena kurangnya usaha kerja sama yang seharusnya dibina oleh perhutani dengan masyarakat setempat untuk terlibat dalam berbagai kerja sama yang saling menguntungkan antara warga masyarakat tamping dengan perhutani.

Kerja sama antara masyarakat dengan perhutani, termasuk dengan pemerintah, tampaknya merupakan kegiatan yang tidak bisa ditolak lagi. Salah satu upaya yang banyak dilakukan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat tamping melalui kekuatan inisiatif-inisiatif lokal, yakni penguatan kapasitas masyarakat berbasis pada kekuatan masyarakat itu sendiri. Pola pengembangan ini banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga *non government* dalam rangka untuk menguatkan kemandirian masyarakat pinggiran hutan. Selain agar tidak terlalu tergantung terhadap lingkungan hutan, terutama pemenuhan kebutuhan ekonominya, juga menghasilkan

kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Yang sering menjadi penyebab utama kerusakan hutan bukanlah perbuatan penebangan pohon dari warga lokal, melainkan karena aktivitas menggembala hewan ternak di lingkungan hutan yang sering memakan bibit-bibit atau pohon yang masih kecil. Karenanya, warga masyarakat memang memerlukan penguatan kapasitas terkait dengan keterlibatan mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah melalui penjagaan terhadap pohon-pohon yang masih berumur kurang dari 2 tahun dari kerusakan akibat dimakan hewan ternak atau ditebang untuk kepentingan pembukaan area persawahan.

Warga masyarakat tamping memang memiliki tanggung jawab sosial besar dalam menjaga alam lingkungan agar terhindar dari berbagai kerusakan yang dibuat oleh keteledoran dan keserakahan manusia. Di samping karena lokasinya yang paling dekat dengan hutan, mereka adalah warga yang secara langsung bersentuhan dengan lingkungan hutan. Melibatkan warga masyarakat tamping dalam menjaga lingkungan hutan lebih efektif dan efisien.

Kendala utama melibatkan warga masyarakat tamping adalah terkait dengan problem pengetahuan, status sosial ekonomi serta rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Hal ini karena bagi mereka hutan di sekitar mereka memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan utama. Karenanya, wajar jika resistensi warga terhadap keinginan agar warga sekitar hutan terlibat dalam pelestarian lingkungan terkendala oleh tradisi yang selama ini mereka miliki. Itulah sebabnya, diperlukan penguatan kapasitas warga sebagai *community development* yang menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan informasi terkait dengan problema lingkungan, termasuk isu *global warming*. Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat tamping yang mayoritas berprofesi sebagai petani, dan selebihnya adalah kerja serabutan.

Memperhatikan berbagai profesi yang ada, terlihat bahwa mayoritas dari mereka sangat tergantung dari sumber daya hutan. Kondisi ini pada masa yang akan datang dikhawatirkan dapat merusak kualitas ekologi yang ada, sehingga memang perlu penguatan kapasitas masyarakat agar terjadi pengalihan profesi yang tidak lagi bersandarkan pada sumber daya hutan.

Dengan demikian penguatan kapasitas ini juga bermanfaat bagi upaya pelestarian lingkungan hutan, agar tidak dirusak oleh aktivitas ekonomi

warga. Berbagai alternatif memang banyak dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan hutan, selain penguatan kapasitas masyarakat, juga disebarluaskannya berbagai pamflet dan poster terkait dengan kelestarian lingkungan juga dilakukan.

Yang menarik adalah keterlibatan masyarakat tamping dalam LMDH ternyata justru memberikan kontribusi positif bagi partisipasi aktif mereka dalam melestarikan lingkungan hutan yang ada. Keterlibatan ini tentu saja perlu dioptimalisasikan. Salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan kapasitas masyarakat hutan melalui pembentukan Forum Warga yang terbentuk melalui FGD (*Focus Group Discuessi*) terkait dengan pengelolaan lingkungan hutan. Melalui FGD yang pernah dilakukan sejumlah lembaga terkait dengan peran serta warga memang menunjukkan bentuk-bentuk kesadaran atas pentingnya pelestarian hutan yang dilakukan oleh warga setempat. FGD ini berfungsi memperoleh informasi terkait dengan pengetahuan warga tentang pelestarian lingkungan beserta upaya yang pernah mereka atau lembaga lain lakukan terkait dengan pelestarian lingkungan tersebut.

Pengelolaan lingkungan hutan serta penyebaran informasi pelestarian hutan menjadi efektif jika melibatkan masyarakat tamping sebagai subjek, bukan objek. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan hutan di sekitar mereka akan memunculkan sikap memiliki hutan sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Bagi Kasdi, LMDH yang ada di wilayah Kedewan merupakan salah satu contoh lembaga lokal yang selama ini aktif dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan warga serta menjadi mediasi antara warga dengan pihak pengelola hutan terkait dengan keinginan warga untuk mengelola *recek* yang ada di sekitar hutan tersebut.

Lembaga-lembaga lokal, baik formal maupun non formal terutama yang bersifat *bottom up* memang masih memerlukan pendampingan dari lembaga lain yang *concern* dalam menangani isu lingkungan hidup. Hal ini karena keterbatasan SDM yang mereka miliki sehingga meminimalisir keterlibatan warga secara lebih optimal.

Simpulan

Isu pemanasan global atau *global warming* yang telah menjadi isu dunia ternyata tidak serta merta dipahami oleh masyarakat sekitar hutan di Bojonegoro dan Tuban atau disebut sebagai masyarakat tamping. Masyarakat tamping sebagai

masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung dari sumber daya hutan seharusnya menjadi bagian warga dunia yang merespons isu tersebut. Hal ini karena *global warming* muncul salah satunya karena rusaknya kelestarian hutan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Namun demikian, dalam kenyataannya masyarakat tamping justru merupakan masyarakat yang tidak pernah merespon isu *global warming* atau bersikap apatis. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya respons masyarakat tamping tersebut. Salah satu faktor terbesarnya adalah kendala penguasaan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat tamping. Sebagai masyarakat pinggiran, mereka adalah komunitas yang setiap harinya menggunakan bahasa Jawa (ngoko dan kromo) untuk komunikasi sehari-hari. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sarana pemerolehan informasi semakin menyulitkan masyarakat tamping dalam menerima informasi tentang *global warming*.

Hal ini bisa dimaklumi karena hampir keseluruhan arus informasi terkait dengan isu pelestarian lingkungan dan *global warming* menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh mereka. Di samping itu akses untuk memperolehnya saja mereka juga mengalami kesulitan. Aktivitas di tengah hutan yang begitu menyita waktu mengakibatkan konsentrasi kehidupannya lebih banyak dilakukan di luar rumah pada siang harinya. Praksis mereka tidak begitu peduli terhadap berbagai informasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan kehidupan mereka.

Jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat tamping tentu saja wajar jika mereka apatis terhadap isu *global warming*. Di samping tingkat pendidikan yang rendah, juga problema penguasaan bahasa yang banyak menjadi kendalanya. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan isu *global warming* mengalami kesenjangan pengetahuan dari *common sense* yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagi mereka, bagaimana mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan apa adanya sudah cukup tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan eksploitatif. Kesenjangan pengetahuan ini menjadikan isu *global warming* memiliki jarak pengetahuan masyarakat tamping. Mereka merasa asing dengan istilah tersebut sekaligus juga berkeyakinan bahwa isu *global warming* itu tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Diperlukan media yang efektif dan mudah diterima oleh masyarakat setempat dalam rangka pemerolehan informasi tentang pelestarian lingkungan dan isu *global warming*. Media itu haruslah memiliki

kedekatan emosi dengan masyarakat tamping serta dengan menggunakan bahasa yang akrab dengan komunikasi mereka. Salah satu yang diperlukan adalah penguatan kapasitas lokal dan inisiatif lokal dalam rangka memberdayakan masyarakat tamping agar memiliki kemandirian dalam memperoleh akses informasi, yakni semacam penguatan forum-forum non formal yang banyak berkembang dalam masyarakat tamping.

Masalah dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat. Melalui perwujudan *good governance*, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka upaya pelestarian lingkungan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara melalui potensinya dalam membangun koalisi dan aksi kolektif.

Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk memberdayakan masyarakat mengelola lingkungan hidupnya: 1) mengembangkan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungannya, 2) mengembangkan kerja sama yang intensif dengan media massa dalam hal sosialisasi dan pemberitaan mengenai peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, 3) memberikan apresiasi terhadap kelompok masyarakat yang berhasil mengelola lingkungannya, 4) pengintegrasian aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi tawar (*bargaining power*) dalam hal isu lingkungan.

Terpenting dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah masyarakat sadar sebagai bagian dari lingkungan di mana ia berada, tumbuhnya kearifan lokal dalam mengelola lingkungan, pelan-pelan diharapkan akan menjadi budaya "Cinta Lingkungan" yang tumbuh di setiap sanubari warga masyarakat.

Daftar Pustaka

- BPS (2008) Jawa Timur dalam Angka. Surabaya: BPS.
- BPS (2009) Kecamatan Kedewan dalam Angka. Bojonegoro: BPS.
- BPS (2009) Kecamatan Ngambon dalam Angka. Bojonegoro: BPS.
- BPS (2009) Kecamatan Kasiman dalam Angka. Bojonegoro: BPS.
- BPS (2008) Bojonegoro dalam Angka. Bojonegoro: BPS.
- Christal, D (1992) *The Cambridge Encyclopedia of Language*. New York: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Daeng, H (2000) *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laksono, PM (2000) *Menjaga Alam Membela Manusia*. Yogyakarta: Lafadf.
- Laksono, PM (2004) *Ken Sa Faak, Benih Benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*. Yogyakarta: Insist Press.
- Pringgawidagdo, S (2009) *Strategi Penguasaan Berbahasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Rivers, WL, Jay, WJ, & Petersen, T (2004) *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Suyanto, B & Jalal, M (2001) *Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Suyanto, B & Ariadi, S (2009) *Rencana Implementasi Pengembangan Ekologi Alam Kepulauan di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Suyanto, B & Karnaji (2004) *Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Wahono, F, Widyanta, AB & Kusumajati, TO (2004) *Pangan, Kearifan Lokal dan Keragaman Hayati*. Yogyakarta: Pustaka Rakyat Cerdas Cinderalas.